

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2016), maka pembangunan Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yaitu tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (tahun 2011-2013), dan tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin (tahun 2014-2016).

A. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tahun 2011-2013)

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016 serta percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini adalah agar terwujud percepatan kesejahteraan masyarakat Grobogan sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya kepentingan umum.
7. Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri

- dan perdagangan yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi bagi investor yang bergerak di bidang industri dan perdagangan yang terkait dengan produksi pertanian dalam arti luas.

B. Tahapan Perwujudan Masyarakat Grobogan Sejahtera (Tahun 2014-2016)

Pada tahap ini lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Grobogan dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumberdaya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antara umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

7.2 Program Pembangunan

7.2.1. Program pada Setiap SKPD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa surat-menyurat.

- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
- 5) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala alat rumah tangga.
- 2) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan listrik.
- 4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
- 5) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan mesin/kartu absensi.
- 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 3) Pengadaan pakaian kerja lapangan.

d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemulangan pegawai yang pensiun.
- 2) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
- 3) Pemindahan tugas PNS.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran.
- 3) Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.
- 4) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

g. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah.
- 2) Penyediaan jasa pelayanan medis.
- 3) Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya.

7.2.2. Program per Urusan

7.2.2.1. Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Arah kebijakan di bidang pendidikan ini antara lain peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga kependidikan.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD formal.
- 2) Penyiapan akreditasi TK.
- 3) Pembangunan gedung sekolah.
- 4) Penambahan ruang kelas.

b. Program Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung sekolah.
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah.
- 3) Penambahan ruang guru sekolah.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas sekolah.

c. Program Pendidikan Menengah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung sekolah.
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah.
- 3) Penambahan ruang guru sekolah.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
- 5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas sekolah.

d. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
- 2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
- 3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
- 4) Pengembangan pendidikan keaksaraan.
- 5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

e. Program Pendidikan Luar Biasa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung sekolah.
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah.
- 3) Penambahan ruang guru sekolah.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
- 5) Pengadaan perlengkapan, mebelair dan sarana mobilitas sekolah.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidikan.
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

4) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG).

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.

2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan.

3) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan.

h. Program Pendidikan Moral Berkelanjutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa.

2) Pelaksanaan kurikulum tentang Pancasila dan etika bangsa sejak dari SD sampai Perguruan Tinggi.

i. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

2. Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri.

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

- 3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin.

b. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- 1) Pelayanan dengan program Jamkesmas dan Jamkesda.
- 2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
- 3) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas pembantu.
- 4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
- 5) Perbaikan gizi masyarakat.

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengawasan peredaran obat komunitas dan klinik.
- 2) Pembinaan dan pengawasan obat tradisional.
- 3) Pembinaan dan pengawasan kosalkes.
- 4) Pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman.

d. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
- 2) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
- 3) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
- 2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin.

- 3) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
- f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
 - 3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
 - 4) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.
 - 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyuluhan kesehatan anak balita.
 - 2) Imunisasi bagi anak balita.
 - 3) Rekrutmen tenaga pelayanan perawatan kesehatan anak balita.
 - 4) Pelatihan pendidikan perawatan anak balita.
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan anak balita.
- h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
 - 2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
 - 3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
 - 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyemprotan/ *fogging* sarang nyamuk.
 - 2) Pengadaan alat *fogging* dan bahan-bahan *fogging*.
 - 3) Pengadaan vaksin penyakit menular.
 - 4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
 - 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyusunan standar pelayanan kesehatan.
 - 2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
 - 3) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.
 - 4) Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan.
- k. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pelayanan operasi katarak.
 - 2) Pelayanan kesehatan THT.
 - 3) Pelayanan operasi bibir sumbing.
 - 4) Pelayanan sunatan masal.
 - 5) Penanggulangan ISPA.
- l. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
 - 2) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - 3) Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit.
 - 4) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan.
- m. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan puskesmas pembantu.
- 2) Pengadaan puskesmas keliling.
- 3) Pembangunan posyandu.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, dan posyandu.
- 5) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.

n. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan peningkatan prasarana fisik rumah sakit.
- 2) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit.
- 3) Pembangunan gudang obat/apotik.
- 4) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III).
- 5) Pengembangan ruang-ruang penunjang rumah sakit.
- 6) Rehabilitasi ruang-ruang penunjang rumah sakit.

o. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit.
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala ruang-ruang penunjang rumah sakit.

p. Program Peningkatan Kapasitas SDA, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan non formal.
- 2) Peningkatan ketrampilan di bidang teknis medis.
- 3) Peningkatan ketrampilan di bidang manajerial.

- **RSUD Dr. Soedjati S. (BLUD)**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. **Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit.
 - b. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa promosi kesehatan.
 - 2) Penyediaan jasa farmasi dan jasa pelayanan.
 - c. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - d. **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
 - e. **Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa penguburan pasien tidak mampu, klaim pembayaran darah dan alat kesehatan.
 - f. **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan obat-obatan rumah sakit.
 - 2) Pengadaan meubelair rumah sakit.
 - 3) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, *laundry*, ruang tunggu dan lain-lain).
 - 4) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.

g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air bersih.

3. Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan akan adanya perumahan bagi segenap masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana dan prasarana di perumahan dan kepentingan umum.

- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan.
- 2) Pembangunan jembatan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/peningkatan infrastruktur.

- Dinas Bina Marga

a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dan monitoring.

- 2) Pra survei dan peningkatan jalan dan jembatan.
- b. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan turap/ talud/ bronjong.
 - c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
 - 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Inspeksi kondisi jalan.
 - 2) Inspeksi kondisi jembatan.
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat.
 - 2) Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.
 - 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan sistem informasi/*database* jalan.
 - 2) Penyusunan sistem informasi/*database* jembatan.
 - 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan alat-alat berat.
- 2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.
- 3) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.
- 4) Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.

i. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan dan jembatan desa.
- 2) Pembangunan jalan poros desa.

- Dinas Pengairan

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
- 2) Pembangunan *reservoir*/embung.
- 3) Perencanaan pembangunan irigasi.
- 4) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.

b. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- 2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- 3) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- 4) Pembangunan sumur-sumur air tanah.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- 2) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- 3) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau.
- 4) Studi potensi sumber daya air dan sumberdaya lainnya.

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
- 3) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
- 4) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah.
- 5) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum.

e. Program Pengendalian Banjir, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan *reservoir* pengendali banjir.
- 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan *reservoir* pengendali banjir.
- 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
- 4) Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

f. Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Verifikasi ijin usaha jasa konstruksi.
- 2) Pembinaan forum pengadaan.

g. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Pengairan dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan bank data pengairan.
- 2) Penyusunan *master plan* program pengembangan sumber daya air secara bertahap.
- 3) Penyusunan neraca air.
- 4) Penyusunan data konservasi sumber daya air.

h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerapan *MOU/* Nota Kesepakatan tentang kewenangan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi sebagai penjabaran tugas pembantuan.

4. Perumahan Rakyat

Penekanan kebijakan di urusan perumahan ini pemenuhan kebutuhan rumah yang layak sehat dan aman serta bersemi.

a. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).
- 3) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
- 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.

b. Program Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.
- 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

- 3) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan.
 - 4) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
- c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Fasilitas pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan.
 - 2) Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
 - 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan.
 - 4) Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah.
- d. Program Perbaikan Perumahan** akibat bencana alam/sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
 - 2) Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
 - 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman.
 - 2) Pengumpulan dan analisis *data base* jumlah jiwa yang meninggal.
 - 3) Koordinasi pengelolaan areal pemakaman.
 - 4) Koordinasi penataan areal pemakaman.
- f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

5. Penataan Ruang

Penekanan kebijakan dalam urusan ini meningkatkan perencanaan tata ruang dan kawasan daerah.

a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang.
- 2) Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL.
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
- 4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- 5) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.

b. Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
- 2) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang.
- 3) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- 5) Survei dan pemetaan.

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- 5) Pengawasan pemanfaatan ruang.

d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH.
- 2) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH.
- 3) Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH.
- 4) Penataan dan Penyusunan program pengembangan RTH.
- 5) ruang terbuka hijau.

6. Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan disini adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan *capable*.

a. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan.
- 2) Penyusunan dan pengumpulan data/konfirmasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 3) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana.

b. Program Kerjasama Pembangunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan.
- 2) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
- 3) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
- 4) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah.

c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan indikasi kegiatan anatar lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.

- 2) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan perbatasan antar daerah.
- 3) Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan.
- 4) Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan.

d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 3) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

e. Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan.
- 2) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan.
- 3) Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.
- 4) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 5) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri.

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
- 2) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

- 3) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
- 2) Penyusunan rancangan RKPD.
- 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- 4) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- 5) Penyusunan RKT, Renstra dan penetapan kinerja setda Grobogan.

h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyusunan *masterplan* pendidikan.
- 2) Koordinasi penyusunan *masterplan* kesehatan.
- 3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
- 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi ekuinda, informasi dan distribusi komoditas strategis.
- 2) Penunjang koordinasi dan promosi potensi daerah.

j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyusunan *masterplan* prasarana perhubungan daerah.

2) Koordinasi penyusunan *masterplan* pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana.

2) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.

3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

7. Perhubungan

Arah kebijakan disini antara lain mengembangkan sarana dan prasarana transportasi, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah.

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

2) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan.

3) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

4) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.

5) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

2) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.

3) Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas.

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang.
- 2) Peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan.
- 3) Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.
- 4) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.
- 5) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung terminal.
- 2) Pembangunan halte bus.
- 3) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, *traffic light* dan marka jalan.

e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor.
- 2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.
- 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

8. Lingkungan hidup

Penekanan kebijaksanaan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura.
- 2) Pemantauan kualitas lingkungan dan penataan kawasan Kars.
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- 4) Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI).

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
- 2) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
- 3) Pengendalian dampak perubahan iklim.
- 4) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
- 5) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air.

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan.
- 3) Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
- 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan.

- 3) Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah.
 - 4) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah.
 - 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- e. **Program Peningkatan Pengendalian Polusi**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor.
 - 2) Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri.
 - 3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
 - 4) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.
 - 5) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.
- f. **Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- g. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan TPA persampahan.
- i. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan tanaman penghijauan.
- j. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah.
 - 2) Bimbingan teknis persampahan.

9. Pertanahan

Penekanan kebijakannya yaitu peningkatan penataan pertanahan yang legal dan tertib administrasi dan normatif.

a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan sistem pendaftaran tanah.
- 2) Sosialisasi sistem pendaftaran tanah.

b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- 2) Penyuluhan hukum pertanahan.

c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kebijakan ini mempunyai sasaran antara lain untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk serta tertib administrasi.

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
- 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK.
- 3) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, dan pemeliharaan).
- 4) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (*inter phase* tahap awal) NIK.
- 5) Pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP)
- 6) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan kepada anak.

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Pelaksanaan penetapan Kebijakan Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan layak anak.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
- 3) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
- 4) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
- 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah.
- 2) Pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT.
- 3) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan.
- 4) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP).
- 5) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.

d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan organisasi perempuan.
- 2) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
- 3) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- 4) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
- 5) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.

e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Workshop* peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.
- 3) Advokasi pengarusutamaan hak-hak anak.
- 4) Advokasi pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan kebijakan disini meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga mewujudkan keluarga yang berkualitas.

- a. Program Keluarga Berencana**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.
 - 2) Pelayanan KIE.
 - 3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.
 - 4) Promosi pelayanan KHIBA.
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**, dengan indikasi antara lain kegiatan sebagai berikut:
- 1) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
 - 2) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
- c. Program Pelayanan Kontrasepsi**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pelayanan konseling KB.
 - 2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
 - 3) Pengadaan alat kontrasepsi.
 - 4) Pelayanan KB medis operasi.
- d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB.
- e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

- f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR.
 - 2) Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.
- g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah.
- h. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak.
- i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
- j. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.

13. Sosial

Kebijakan di urusan ini diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penyandang eks penyakit kronis dan cacat.

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan**

Sosial (PMKS) Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- 2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.
- 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
- 5) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
- 2) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
- 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
- 5) Pelayanan psikososial bagi PMKS di *trauma centre* termasuk bagi korban bencana.

c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan

indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.
- 2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo.
- 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.
- 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
- 2) Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial.
- 3) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.
- 4) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.

e. Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
- 4) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- 5) Pemberdayaan karang taruna.

f. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan anak jalanan dan anak potensial dari keluarga kurang mampu.

g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penanganan penyandang cacat.
- 2) Pemberdayaan tim advokasi *difabel* (penyandang cacat).

h. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan bahan bantuan bencana alam.

14. Ketenagakerjaan

Sasaran kebijakan ini antara lain tersusunnya perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan secara cepat dan tepat.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan *database* tenaga kerja daerah.
- 2) Pembangunan balai latihan kerja.
- 3) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja.
- 4) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK.
- 5) Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja.

b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan

Kerja, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
- 2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- 4) Penyiapan tenaga kerja siap pakai.
- 5) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- 6) Pengembangan kewirausahaan.

c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.
- 2) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 3) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- 4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
- 5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

15. Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Penekanan kebijakan antara lain untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penataan kelembagaan.

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah.
- 3) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha mikro kecil dan menengah.
- 4) Pendirian unit penanganan pengaduan.
- 5) Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.
- 2) Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha, mikro kecil dan menengah dengan perusahaan asing.
- 3) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Peningkatan kerjasama di bidang HAKI.
- 5) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
- 2) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.
- 3) Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil menengah.

d. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- 3) Pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.
- 4) Sosialisasi prinsip-prinsip koperasi dan pemahaman koperasi
- 5) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

16. Penanaman Modal

Penekanan kebijakan ini antara lain peningkatan dan pendayagunaan investasi pemerintah daerah yang semakin kompleks dan merata.

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.

- 2) Pengembangan potensi unggulan daerah.
- 3) Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).
- 4) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA.
- 5) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.
- 2) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
- 3) Penyusunan cetak biru (*blueprint*) pengembangan penanaman modal.
- 4) Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- 5) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.
- 6) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.
- 2) Pengembangan penanaman modal.

d. Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan, koperasi di wilayah pedesaan.

e. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha, dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan pengembangan permodalan, *lingkage* Usaha Jaringan, Pengusaha, Anggota Koperasi simpan pinjam seperti (KSP/USP).
- 2) Kredit usaha rakyat bagi peningkatan akses permodalan rakyat.

17. Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/ keanekaragaman budaya.

a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya.
- 4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
- 2) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka.
- 3) Pelestarian bangunan cagar budaya.
- 4) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
- 5) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.

7) Pengembangan *database* sistem informasi sejarah purbakala.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi:

- 1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- 2) Penyusunan sistem informasi *database* bidang kebudayaan.
- 3) Penyelenggaraan dialog kebudayaan.
- 4) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
- 5) Pembinaan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta.
- 2) Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah.
- 3) Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan kepemudaan kearah kemandirian dan trampil serta inovatif.

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendataan potensi kepemudaan.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.
- 3) Pembinaan kepemudaan.

- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pembinaan organisasi kepemudaan.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
 - 3) Pembinaan Organisasi kepemudaan.
- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
 - 2) Pelatihan keterampilan bagi pemuda.
 - 3) Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
- d. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.
- e. Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga.
 - 2) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah.
 - 3) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.
 - 4) Pembinaan SDM Olah Raga.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

- 3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

g. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.
- 2) Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi.
- 3) Pengembangan perencanaan olah raga terpadu.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga.

j. Program Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perintisan dan pengembangan kampung pemuda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan disini antara lain meningkatkan rasa persatuan dan menjaga stabilitas politik yang tangguh dan dinamis serta taat hukum, sehingga dapat menjaga iklim usaha yang kondusif.

a. Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat.
- 2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik.
- 3) Koordinasi forum-forum diskusi politik.
- 4) Penyusunan *data base* partai politik.
- 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 6) Dukungan penyelenggaraan Pemilu.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

- 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

c. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan.
- 3) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan.
- 4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
- 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pencapaian *halaqoh* dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- 2) Seminar, *talk show* dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
- 3) Pentas seni dan budaya, festival dan lomba karya-cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikasi kegiatan lain sebagai berikut:

- 1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Pembangunan pos jaga/ ronda.
- 3) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 4) Pengendalian kebisingan dan gangguan dan kegiatan masyarakat.
- 5) Pengendalian keamanan lingkungan.

g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat), dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.
- 2) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
- 3) Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu.
- 4) Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.

h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
- 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- 4) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.
- 5) Penanganan dan evaluasi korban bencana alam.

i. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
- 2) Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
- 3) Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung.
- 4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kabakaran.
- 5) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur dan adil serta transparan.

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- 2) Dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- 4) Rapat-rapat paripurna.
- 5) Kegiatan reses.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

- 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.
- 3) Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- 4) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan analisis standar belanja.
- 2) Penyusunan standar satuan harga.
- 3) Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah.
- 4) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota.
- 2) Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota.
- 3) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- 4) Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota.
- 5) Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa.
- 2) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa.

- 3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa.
- 4) Koordinasi fasilitasi dan supervisi program APBD desa.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
- 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
- 4) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya.

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
- 2) Penilaian pelaksanaan pelayanan publik.
- 3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.
- 2) Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi.

3) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah bidang hukum.

j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.
- 3) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.

k. Program Pendidikan Kedinasan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan teknis.
- 2) Pendidikan penjurusan struktural.
- 3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Pembuatan buku petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan.

i. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah.
- 2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah.
- 3) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah.
- 4) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah.

m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
- 2) Seleksi penerimaan CPNS.
- 3) Penempatan PNS.
- 4) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.

5) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.

n. Program Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan Indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan pedoman umum perangkat daerah.
- 2) Pembentukan perangkat daerah.
- 3) Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah.
- 4) Pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
- 5) Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.

o. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan pedoman tata naskah dinas.
- 2) Penyusunan pedoman pakaian dinas.
- 3) Penyusunan pedoman tata ruang kantor.
- 4) Penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat.

p. Program Pendayagunaan Aparatur Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi pendayagunaan aparatur daerah.
- 2) Publikasi/sosialisasi kebijakan pendayagunaan aparatur daerah.
- 3) Penyusunan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur daerah.
- 4) Fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur.
- 5) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

q. Program Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha lembaga jasa konstruksi.
- 2) Penyusunan pedoman pelaksanaan APB.

- 3) Pembuatan bank data kegiatan pembangunan daerah.
 - 4) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- r. Program Pelayanan dan Perijinan Terpadu**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan.
 - 2) Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu.
 - 3) Penyusunan rancangan peraturan perijinan.
 - 4) Penyusunan penetapan perijinan.
- s. Program Koordinasi Terpadu Bidang Perekonomian**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Koordinasi kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT).
 - 2) Kesiapan ketersediaan kelompok usaha ekonomi produktif.
 - 3) Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil.
 - 4) Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah.
- t. Program Koordinasi Bidang Tata Pemerintahan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - 3) Koordinasi pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan.
 - 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- u. Program Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan desa.
 - 2) Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD.
 - 3) Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa.

4) Inventarisasi kekayaan desa.

v. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan konsultasi penanganan masalah sosial.
- 2) Koordinasi dan konsultasi keolahragaan, kepemudaan dan pemberdayaan perempuan.
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama.
- 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

w. Program Koordinasi Bidang Kehumasan, dengan indikasi

kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum.
- 2) Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah.
- 3) Penyerbarluasan informasi melalui media massa.
- 4) Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster.

x. Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah, dengan

indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional.
- 2) Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah.

y. Program Sandi dan Telekomunikasi, dengan indikasi

kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi.
- 2) Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi.

z. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa.

- 2) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- 3) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan.
- 4) Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan.

aa. Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kelurahan,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- 2) Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan.
- 3) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan.
- 4) Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan.
- 5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan.

bb. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan SKPD, SKRD, dan optimalisasi peran mantri pajak dan UPTD.

cc. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendataan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Pensertifikatan tanah dan pengadaan papan nama kodifikasi.
- 3) Pelatihan SDM aplikasi monitoring PBB.

dd. Penatalaksanaan Pemerintahan Daerah,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Penetapan Kinerja, Renja, Renstra dan LAKIP DPPKAD.

- Inspektorat

- a. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
 - 2. Inventarisasi temuan pengawasan.
- c. **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

21. Ketahanan Pangan

Kebijakan ini antara lain menjaga stabilitas harga pangan dan pengawasan distribusi pangan agar sesuai dengan ketentuan dan aspek legalitas.

- a. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penanganan daerah rawan pangan.
 - 2) Penyusunan database potensi produk pangan.
 - 3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.
 - 4) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.
- a. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan *data base* ketahanan pangan.
 - 2) Penyusunan pola pangan harapan (PPH)

- b. Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengembangan desa mandiri pangan.
 - 2) Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- c. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
 - 2) Penunangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
 - 3) Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok.
- e. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - 2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
- f. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan pangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain:
- 1) Penanganan keluarga rawan pangan pasca bencana.
 - 2) Pengembangan cadangan pangan masyarakat.
- g. Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan**, dengan indikasi kegiatan antara lain:
- 1) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.
 - 2) Pemantauan dan analisa harga pangan pokok.
- h. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi**, dengan indikasi kegiatan antara lain:
- 1) Pengembangan kreasi pangan olahan.
 - 2) Penyuluhan sumber pangan alternatif.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.
- 3) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa.
- 4) Peningkatan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK).

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
- 2) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 3) Pemberian stimulan pembangunan desa.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan.
- 2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
- 3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
- 4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Pembekalan anggota BPD.

d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pelatihan ketrampilan budidaya tanaman.

2) Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa.

3) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.

4) Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan.

5) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

6) Pengembangan lembaga ekonomi.

f. Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pendataan profil desa dan kelurahan.

g. Program Pengentasan Kemiskinan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

1) Unit pengaduan masyarakat dan pemantauan (UPMP) beras miskin.

2) Penunjangan administrasi pemugaran perumahan penduduk miskin.

3) Pelatihan kader posyandu menuju sistem informasi posyandu (SIP).

23. Statistik

Kebijakan ini menekankan pada peningkatan kesediaan data yang canggih dan aktual serta dapat mudah diakses secara cepat dan tepat.

a. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
- 2) Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah.
- 3) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB.
- 4) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.

24. Kearsipan

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk menyiapkan kegiatan Kearsipan dan penyimpanan secara bertanggung jawab secara normatif dan aman.

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan database informasi kearsipan.
- 2) Pengumpulan data.
- 3) Pengklasifikasian data.
- 4) Penyusunan sistem katalog data.
- 5) Pengadaan sarana penyimpanan.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
- 2) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
- 3) Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.
- 4) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data.

c. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip.
- 2) Penyediaan sarana layanan informasi arsip.
- 3) Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta.

e. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan otomasi arsip aktif dan in-aktif.

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP/SMU/SMK Negeri/swasta se-Kab. Grobogan.
- 2) Pameran Ketrampilan.

25. Komunikasi dan Informatika

Penekanan arah kebijakan ini antara lain peningkatan kualitas Informasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP.
- 2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
- 3) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi.
- 4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

c. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

d. Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

3) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

4) Sosialisasi ketentuan mengenai Cukai Tembakau.

e. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) koordinasi kehumasan daerah Kabupaten Grobogan.

2) Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal di Kabupaten Grobogan.

3) Penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dan media massa.

4) Pengelolaan komunikasi dan informasi dalam menangani situasi krisis.

5) Penataan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan elektronik.

f. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pada SKPD yang Menangani Urusan Bidang Komunikasi dan

Informasi di Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Lokakarya aparaturnya kehumasan Kabupaten Grobogan dalam rangka publikasi kebijakan strategi pemerintah.
- 2) Asistensi bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik.
- 3) Asistensi bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik.
- 4) Asistensi bimbingan teknis bidang analisis media.
- 5) Asistensi bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi.

g. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika Daerah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah.
- 2) Penyusunan standar kompetensi bidang kehumasan.
- 3) Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Pelayanan informasi aktual media massa cetak dan elektronik.

26. Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
- 2) Pengembangan minat dan budaya baca.

- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendataan karya cetak dan karya rekam.
- 2) Serah dan simpan karya cetak dan karya rekam.
- 3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam.

7.2.2.2 Pelayanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Penekanan kebijakan disini antara lain mengembangkan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha dan produk pertanian.

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
- 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
- 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani.
- 4) Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani dan kelompok tani.
- 5) Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.

- 2) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan.
- 4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.
- 3) Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna.
- 4) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna.

d. Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.
- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.
- 3) Penyuluh dan pendamping bagi pertanian /perkebunan.
- 4) Bantuan operasional pos penyuluh desa.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian /perkebunan.

- 2) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan.
- 3) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.

f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendataan masalah peternakan.
- 2) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
- 3) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik.
- 4) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.

g. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.
- 2) Pembibitan dan perawatan ternak.
- 3) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.
- 4) Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

h. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

i. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan.
- 2) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.

- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan.
- 4) Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan.

j. Program Pengembangan Jaringan Irigasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usahatani.
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi desa.
- 3) Pengembangan irigasi partisipatif.
- 4) Pengembangan irigasi tanah dangkal.

k. Program Pengembangan Pertanian Organik dan Pengembangan Agribisnis, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan rumah kompos.
- 2) Pengadaan *soil test kit*.
- 3) Pelatihan untuk petugas dan petani.
- 4) Kegiatan penanganan panen, pasca panen dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

l. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pos penyuluhan desa (Posluhdes), Balai penyuluhan dan badan pelaksana penyuluhan (Bapeluh).
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).
- 3) Peningkatan pemberdayaan kontak tani nelayan andalan (KTNA), Asosiasi petani.
- 4) Peningkatan kapasitas organisasi penyuluh swadaya, swakarsa dan swasta.
- 5) Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya swakarsa dan swasta.

m. Program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pelatihan dan penyediaan alat mesin *hand tractor*.
- 2) Penyediaan pompa air, *cultivator*, *hand sprayer*, *power sprayer*.
- 3) Penyediaan alat pasca panen: terpal, *pedal thresher*.

n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian/ Perkebunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sekolah lapang iklim.
- 2) Pengelolaan sekolah lapang pengendalian hama penyakit (SLPHP).
- 3) Pengawasan pestisida.
- 4) Pengawasan jalur benih antar lapang (JABAL).
- 5) Peningkatan pemberdayaan petugas pengendali organisme.

p. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pemasaran domestik.

2. Kehutanan

Kebijakan urusan ini antara lain peningkatan kualitas produk kehutanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

a. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Hutan dan Lahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi.
- 2) Pengembangan hutan tanaman.
- 3) Pengembangan hasil hutan non kayu.
- 4) Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

c. Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan kayu.
- 2) Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/milik pribadi.
- 3) Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan.

d. Program Pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembuatan peta-peta tematik kehutanan secara digital.
- 2) Penyusunan data dan statistik kehutanan.

e. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah.

f. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan.
- 2) Pembuatan bibit /benih tanaman kehutanan.
- 3) Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata.
- 4) Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata.

g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.
- 2) Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.
- 3) Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.
- 4) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
- 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

h. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan hutan masyarakat adat.
- 2) Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.
- 3) Perencanaan RHL.

i. Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan kayu.
- 2) Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/milik pribadi.
- 3) Pelayanan pemeriksaan dan pengesahan hasil hutan

j. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan.
- 2) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan.
- 3) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan.
- 5) Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam dan mencari energi alternatif yang mungkin dapat dikembangkan.

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C.
- 2) Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C.
- 3) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C.
- 4) Koordinasi dan pendataan tentang hasil reproduksi dibidang pertambangan.
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C.

b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat.
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat.
- 3) Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi.

c. Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengawasan usaha di minyak dan gas hulu dan hilir.

d. Program Peningkatan Regulasi Energi Sumber Daya dan Mineral, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Regulasi pertambangan umum.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas, dengan indikasi antara lain kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik pedesaan.
- 3) Inventarisasi jaringan listrik pedesaan.
- 4) Pemeliharaan penerangan jaringan listrik (PJU).
- 5) Pengawasan keselamatan kerja dan pengendalian usaha kelistrikan.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan.
- 2) Pembangunan sumur pantau dan ABT.
- 3) Pemetaan cekungan air tanah (CAT).
- 4) Monitoring, pengawasan dan pelaporan bidang geologi.

4. Pariwisata

Kebijakan dalam urusan ini antara lain mengembangkan potensi Pariwisata berdasarkan konsep pengembangan wilayah pariwisata yang konseptual dan terkait dengan wilayah lain.

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- 3) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
- 4) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan objek pariwisata unggulan.
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
- 3) Pengembangan jenis paket wisata unggulan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha.

c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan penguatan informasi dan *database*.
- 2) Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.
- 4) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

5. Perikanan

Penekanan kebijakan ini antara lain memanfaatkan sumber-sumber air dan perairan umum untuk budidaya perikanan.

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan bibit ikan unggul.
- 2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.
- 3) Pembinaan dan pengembangan perikanan.
- 4) Penjajakan teknologi perikanan.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
- 2) Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kajian sistem penyuluhan perikanan.
- 2) Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna perikanan.
- 3) Promosi hasil perikanan.
- 4) Pelatihan petani ikan.

d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

6. Perdagangan

Penekanan kebijakan ini antara lain pengembangan jaringan kemitraan berusaha, juga permodalan di bidang perdagangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.
- 2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen.
- 3) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- 4) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemeteorologian daerah.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industry.

- 2) Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri.
- 3) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor.
- 4) Pengembangan *database* informasi potensi unggulan.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional.
- 2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
- 3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
- 4) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.

d. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan.
- 2) Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.
- 3) Penataan tempat berusaha bagi-pedagang kakilima dan asongan.

7. Perindustrian

Kebijakan ini antara lain untuk pengembangan strategi pemasaran dan pengembangan industri dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang sangat ketat.

a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produk, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi.
- 2) Pelayanan pengembangan modal ventura dan *incubator*.
- 3) Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi.
- 4) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas.

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
- 2) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.
- 3) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah.

c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan kemampuan teknologi industri.
- 2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
- 3) Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur.
- 4) Perluasan penerapan standar produksi industri manufaktur.

d. Program Penataan Struktur Industri, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir.
- 2) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
- 3) Pembinaan keterkaitan produk hulu hilir.

e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial.
- 2) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

f. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan peningkatan ketrampilan pengembangan SDM industri kecil dan menengah aneka industri di Grobogan.

8. Transmigrasi

Penekanan kebijakan ini antara lain pengembangan program-program dan kegiatan transmigrasi yang lebih riil dan produktif sehingga dapat meningkatkan para transmigran.

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan.
- 2) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
- 3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
- 4) Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi.
- 5) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

b. Program Transmigrasi Regional, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan transmigrasi regional.
- 2) Pelatihan transmigrasi regional.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja dan program-program pembangunan seperti tabel berikut ini:

7.3. Matriks Hubungan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Grobogan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meratanya kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini	Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini	Jumlah sekolah pendidikan anak usia dini	200	260	Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK SMP/MTs	113,28	116,8	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	Peningkatan kualitas pendidikan menengah keatas	APK SMA / SMK / MA	34,51	50,6	Peningkatan pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	Berdayanya lembaga pendidikan non formal	Pemberdayaan lembaga pendidikan non formal	Jumlah pendidikan non formal	47	58	Pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatkan pendidikan luar biasa	Peningkatan pendidikan luar biasa	Berkembangnya forum masyarakat peduli bangsa	1	3	Pendidikan luar biasa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
6.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	Rata – rata lama sekolah	6,15	5,2	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
7.	Meningkatnya manajemen pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan	3	6	Manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
8.	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Meningkatnya pembinaan pemuda dan keolahragaan	Pembinaan organisasi kepemudaan	2	4	Peningkatan pembinaan pemuda dan keolahragaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

2. URUSAN KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Terjaminnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan	Menjamin ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Cukup	Sangat cukup dan terdistribusi lancar	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	DINKES
2.	Berdaya individu keluarga dan masyarakat	Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perlakuan hidup sehat	Revitalisasi kesehatan masyarakat	Jalan	Adanya regulasi kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	DINKES
3.	Terjaminnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (/1000 KH) AKI (/100000 KH)	8,12 13	2,42 15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	DINKES
4.	Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat	Peningkatan perbaikan status gizi keluarga dan masyarakat	- TB Paru - Angka kesakitan DBD - Prevalensi gizi buruk	13,57 % 3,40 % 0,13 %	8,2 % 1,20 % 0,9 %	Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	DINKES
5.	Berdayanya masyarakat dalam menangani kesehatan	Peningkatan penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah posyandu	1606	1700 (paripurna)	Program peningkatan penyuluhan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	DINKES
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan anak balita	- Dokter ahli dalam - Dokter mata - Dokter kandungan - Dokter gigi	8 2 7 14	12 4 10 20	Program peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	DINKES
7.	Meningkatnya lingkungan sehat	Meningkatkan lingkungan sehat	Denplat lingkungan sehat	8	12	Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	DINKES
8.	Menurunnya kasus penyakit menular	Penurunan kasus penyakit menular	Konsumsi garam yodium ABK	67,12 % 10,62/1000KH	63,39 % 8/1000 KH	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DINKES

9.	Adanya standarisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatkan kesehatan penduduk miskin	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Belum	Sudah disusun	Program standarisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	DINKES
10.	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	- Desa vokasi - Target penemuan TB Paru - Prevalensi malaria	140 desa 31,1 0,078	210 desa 40,8 0,035	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	DINKES
11.	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan	Angka kesakitan	50,36 per 100.000 penduduk	21,45 per 100.000 penduduk	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	DINKES
12.	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Kegiatan DAK bidang kesehatan	Terprogram	Meningkat	Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	DINKES
13.	Meningkatnya sarana dan prasarana di Rumah Sakit	Peningkatan sarana dan prasarana di Rumah Sakit	- Pembangunan gudang obat - Pembangunan ruang rawat	Terprogram Terprogram	Meningkat Meningkat	Program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	DINKES
14.	Meningkatnya pengawasan obat	Peningkatan pengawasan obat dan makanan	-Lancarnya distribusi Obat dan makanan	12 kali	20 kali	Program pengawasan obat dan makanan	Kesehatan	DINKES
15.	Mengoptimalkannya sumber daya yang ada	Pendayagunaan SDM yang ada	-kinerja dan kedisiplinannya meningkat	Kinerja jalan	Meningkat nya kinerja	Program peningkatan kapasitas SDA	Kesehatan	DINKES
16.	Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RS	Meningkatkan biaya pemeliharaan RS	Terpenuhinya dana kesehatan di RS	Terprogram	Meningkat	Program peningkatan sarana dan prasarana RS	kesehatan	RSD

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

b. RSUD Dr. SOEDJATI S. (BLUD)

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya standar pelayanan minimal kepada masyarakat	Meningkatkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat	Mantapnya standar Pelayanan kepada masyarakat	Ada pelayanan	Mantapnya pelayanan	Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
2.	Meningkatnya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.	Mantapnya promosi Pelayanan kepada masyarakat	terprogram	meningkat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
3.	Mengoptimalkannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	terprogram	Regulasi	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
4.	Mengembangkan standarisasi pelayanan masyarakat	Tersusunnya standarisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Evaluasi dan pengembangan standar	1 kali	3 kali	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
5.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengobati penduduk miskin	Meningkatkan optimalisasi Pelayanan kesehatan	Lancarnya pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin	berjalan	Sangat lancar	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
6.	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas	Lancarnya pemeliharaan rutin berbagai peralatan medis.	Peralatan cukup	meningkat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.
7.	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Semakin meningkat kan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	cukup	Sangat memadai	Program pemeliharaan sarpras rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD Dr. Soedjati S.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan								
1.	Meningkatnya pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	Meningkatnya pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	Pembangunan jalan dan jembatan	Meningkat	Meningkat terus	Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	PU	Dinas Cipta karya
2.	Meningkatnya pembangunan saluran drainase	Meningkatkan pembangunan saluran drainase	Pembangunan saluran drainase	45 %	65 %	Program pembangunan saluran drainase	PU	Dinas Cipta karya
3.	Mewujudkan kondisi wilayah yang lebih hijau	Terwujudnya wilayah yang lebih hijau	Terarahnya pembangunan daerah sesuai RTRW	35 %	65%	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	PU	Dinas Cipta karya
B. Dinas Bina Marga								
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pem-bangunan jalan	Meningkatnya kualitas jalan	45%	60%	Program peningkatan Jalan dan Jembatan	PU	Dinas Bina Marga
2.	Meningkatnya pembangunan talud / bronjong	Meningkatkan pembangunan talud / bronjong	Pembangunan turap / talud	25 %	40 %	Program pembangunan turap / talud / bronjong	PU	Dinas Bina Marga
3.	Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan jalan dan jembatan	48 %	60 %	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	PU	Dinas Bina Marga
4.	Meningkatnya inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Panjang jalan	213,8 km	345,6 km	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	PU	Dinas Bina Marga
5.	Meningkatnya tanggap darurat jalan dan jembatan	Meningkatkan tanggap darurat jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan	272,2 km	382,4 km	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	PU	Dinas Bina Marga

6.	Meningkatnya pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan	Kondisi tanggap darurat	173,4 km	274,5 km	Program pembangunan sistem informasi	PU	Dinas Bina Marga
7.	Meningkatnya sarana dan prasarana kebina-margaan	Meningkatkan sarana dan prasarana kebina margaan	Pemeliharaan alat – alat berat	18	29	Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan	PU	Dinas Bina Marga
8.	Meningkatkan sarana-prasarana ekonomi daerah di pedesaan	Meningkatnya sarana – prasarana ekonomi daerah di pedesaan	-Semakin lancarnya perekonomian daerah	terprogram	Meningkat	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	PU	Dinas Bina Marga
C. Dinas Pengairan								
1.	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi	Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi	200 km	250 km	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	PU	Dinas Pengairan
2.	Tersedianya pengelolaan air baku	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Pembangunan sumur air tanah	20	35	Program penyediaan dan pengolahan air baku	PU	Dinas Pengairan
3.	Meningkatnya konservasi sungai danau dan sumber daya air	Peningkatan konservasi sungai danau dan sumber daya air	Pembangunan embung	3	9	Program pengembangan konservasi sungai danau dan sumber daya air	PU	Dinas Pengairan
4.	Berkembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembinaan teknik pengolahan air limbah	5	9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	PU	Dinas Pengairan
5.	Terkendalinya banjir	Pengendalian banjir	Reservoir pengendalian banjir	20	28	Program pengendalian banjir	PU	Dinas Pengairan
6.	Tercapainya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Memacu pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan infrastruktur	6 %	Meningkat	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	PU	Dinas Pengairan

7.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan	Sarana dan prasarana air bersih pedesaan	3 %	Meningkat	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	PU	Dinas Pengairan
8.	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan lingkungan permukiman	4 %	Meningkat	Program pembangunan jalan lingkungan	PU	Dinas Pengairan
9.	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas jalan	terprogram	Regulasi	Pengaturan jasa konstruksi	PU	Dinas Pengairan
10	Ditetapkan MOU antara pengelola sarana dan prasarana dengan jaringan irigasi	Ditetapkannya MOU antara pengelola sarana dengan jaringan irigasi	Adanya MOU	1 kali	2 kali	Program pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya.	PU	Dinas Pengairan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Berkembangnya perumahan	Tercukupinya kebutuhan perumahan	Pengembangan sarana dan prasarana rumah sederhana	187	256	Program pengembangan perumahan	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
2.	Terwujudnya lingkungan yang sehat	Mewujudkan lingkungan yang sehat	- Pengawasan kualitas lingkungan yang sehat - Pelayanan air bersih	18 unit 16 %	45 unit 26 %	Program lingkungan sehat	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
3.	Terberdayanya komunitas perumahan	Pemberdayaan komunitas perumahan	Sistem pemberian kredit pemilikan rumah	38 unit	80 unit	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
4.	Meningkatnya penataan perumahan	Peningkatan penataan perumahan	Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	85 unit	112 unit	Program perbaikan dan penataan perumahan	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
5.	Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Peningkatan pengelolaan areal pemakaman	Penataan areal pemakaman	5 unit	18 unit	Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
6.	Meningkatnya pelayanan umum	Meningkatkan pelayanan umum	Lancarnya pembayaran retribusi kebersihan	Program	Meningkat	Program pelayanan umum	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK
7.	Meningkatkan ketrampi lan penanganan bahaya kebakaran	Meningkatnya ketrampilan SDM yang Menangani bahaya kebakaran	Seringnya dilakuk-an deklat	3 kali	7 kali	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	Dinas Ciptakarya TRK

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN
5. URUSAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Berkembangnya kinerja pengelolaan persampahan	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan	Manajemen pengelolaan persampahan	Terprogram	Meningkat	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Tata Ruang	Bappeda
2.	Meningkatnya perencanaan tata ruang	Meningkatkan perencanaan tata ruang	Penetapan kebijakan RTRK	3 kecamatan	10 kecamatan	Program perencanaan tata ruang	Tata Ruang	Bappeda
3.	Meningkatnya pemanfaatan ruang	Meningkatkan pemanfaatan ruang	Standar dan criteria pemanfaatan ruang	Terprogram	Rugulasi	Program pemanfaatan ruang	Tata Ruang	Bappeda
4.	Terkendalnya pemanfaatan ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terprogram	Regulasi	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Tata Ruang	Bappeda
5.	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Penataan ruang terbuka hijau	4 unit	9 unit	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Tata Ruang	Bappeda

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Tertatanya pengembangan data	Pengembangan data	Analisa data	2 unit	8 unit	Program pengembangan data / informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.	Meningkatnya kerjasama pembangunan	Meningkatkan kerjasama pembangunan	Kerjasama pembangunan antar daerah	3 unit	6 unit	Program kerjasama pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
3.	Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan	Meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan	Penetapan rencana tata ruang perbatasan	1 unit	5 unit	Program pengembangan wilayah perbatasan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
4.	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatkan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis	2 unit	12 unit	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
5.	Terencananya pengembangan kota - kota	Meningkatkan perencanaan pengembangan kota - kota	Koordinasi perencanaan kota - kota	Program	Regulasi	Program perencanaan pengembangan kota - kota	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
6.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bintek perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	Peningkatan	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
7.	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan laporan kinerja pemda	2 kali	4 kali	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
8.	Meningkatnya perencanaan sosial dan budaya	Meningkatkan perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	2 kali	6 kali	Program perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

9.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 kali	4 kali	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
10.	Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatkan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	1 kali	Meningkat	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
11.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Penyusunan masterplan rawan bencana alam	1 kali	Regulasi	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
12.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	5 unit	15 unit	Program pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
13.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Peralatan gedung kantor	3 unit	10 unit	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
14.	Meningkatnya disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	Program	Regulasi	Program peningkatan disiplin aparatur	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
15.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Diklat SDM	Program	Regulasi	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
16.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan akuntansi tahunan	Tepat waktu	Tepat waktu	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
17.	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
18.	Perencanaan tata ruang	Meningkatkan perencanaan tata ruang	Koordinasi penataan ruang	Terprogram	Regulasi	Program perencanaan tata ruang	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

7. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penambahan prasarana perhubungan	terprogram	Meningkat	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Dishub Infokom
2.	Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Perlengkapan prasarana jembatan tumbang	Terprogram	Regulasi	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dishub Infokom
3.	Meningkatnya pelayanan angkutan	Meningkatkan pelayanan angkutan	Temu wicara dengan pengelola angkutan umum	4 kali	8 kali	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dishub Infokom
4.	Meningkatnya pengamanan lalu lintas	Meningkatkan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu Rambu lalu lintas dan marka jalan	3 kali	8 kali	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dishub Infokom
5.	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatkan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	6 kali	10 kali	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dishub Infokom
6.	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa	Mengembangkan komunikasi, informasi dan media massa	Pembuatan majalah Gema Bersemi	12 kali	12 kali	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perhubungan	Dishub Infokom
7.	Terwujudnya kerjasama informasi dengan media massa	Mewujudkan kerjasama informasi dengan media massa	Dialog interaktif di TV	3 kali	6 kali	Program kerja sama informasi dengan media massa	Perhubungan	Dishub Infokom

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Kajian dampak lingkungan	4 kali	10 kali	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	Badan LH
2.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	4 kali	6 kali	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	Badan LH
3.	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Meningkatkan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Rehabilitasi hutan dan lahan	30	40	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Lingkungan Hidup	Badan LH
4.	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	6	10	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Lingkungan Hidup	Badan LH
5.	Peningkatan pengendalian polusi	Meningkatkan pengendalian polusi	Pengujian emisi kendaraan bermotor	10	12	Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup	Badan LH
6.	Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan ekowisata di kawasan konservasi	2 kali	4 kali	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Lingkungan Hidup	Badan LH
7.	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Penataan ruang terbuka hijau	2 kali	6 kali	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Lingkungan Hidup	Badan LH
8.	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Mengurangi pencemaran lingkungan hidup	Lancarannya pembuangan sampah sampai TPA	Terprogram dengan baik	Regulasi antisipatif	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Badan LH

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

9. URUSAN PERTANAHAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pembangunan sistem pendaftaran tanah	Meningkatkan pembangunan sistem pendaftaran tanah	Regulasi sistem pendaftaran tanah	Terprogram	Regulasi	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pertanahan	Bag Tapem
2.	Meningkatnya penataan kepemilikan tanah	Meningkatkan penataan kepemilikan tanah	-Penyuluhan hukum pertanahan -Program Prona	12 kali Program	14 kali Regulasi	Program penataan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Bag Tapem
3.	Terselesaikannya konflik – konflik pertanahan	Menyelesaikan dengan cepat bila ada konflik – konflik pertanahan	Ada konflik – konflik pertanahan	Segera diselesaikan	Tidak ada konflik pertanahan	Program penyelesaian konflik – konflik pertanahan	Pertanahan	Bag Tapem

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik	Menata administrasi kependudukan	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Cukup	SDM terampil dan professional	Program penataan administrasi kependudukan	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil
2.	Peningkatan kualitas sistem informasi data keluarga miskin	Meningkatnya kualitas sistem informasi data keluarga miskin	Adanya data penduduk miskin yang lebih sah	2 kali	4 kali	Program peningkatan kualitas sistem informasi data keluarga miskin	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil
3.	Terberdayanya UKP bagi penduduk miskin	Pemberdayaan UKP bagi penduduk miskin agar lebih cepat meningkatkan kesejahteraannya	Ketrampilan teknologi tepat guna bagi anggota UKP	4 kali	6 kali dan bantuan modal usaha	Program UKP (Usaha Kelompok Produktif) bagi penduduk miskin	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil
4.	Meningkatnya SDM yang menangani kependudukan	Peningkatan SDM yang menangani kependudukan	Pelatihan registrasi bagi pamong desa	3 kali	4 kali dengan pendampingan	Program peningkatan SDM yang menangani kependudukan	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil
5.	Terberdayanya peningkatan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Pemberdayaan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Pembinaan kepada penduduk usia lanjut yang tidak mampu di luar panti	3 kali	6 kali	Program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil
6.	Meningkatkan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Ketaatan jam kerja	Terprogram	Terprogram dengan absen elektronik	Program peningkatan disiplin aparatur	Kependudukan dan capil	Dispenduk Capil

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kesetaraan gender dan perlindungan anak	2 kali	4 kali	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
2.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	6 obyek	8 obyek	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
3.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penyusunan profil perlindungan perempuan dan lansia serta cacat	Terprogram	Regulasi	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
4.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelatihan kesetaraan gender	2 kali	6 kali	Program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	Perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
5.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	6	8	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan program KB	Meningkatnya program KB	Pengadaan sarana mobilitas dan KB keliling	10	14	Program KB	KB	BP3AKB
2.	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja				Program kesehatan Reproduksi remaja	KB	BP3AKB
3.	Peningkatan pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya pelayanan kontrasepsi	Pelayanan KB medis operasi	165	230	Program pelayanan kontrasepsi	KB	BP3AKB
4.	Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	Pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB mandiri	4	8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	KB	BP3AKB
5.	Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Penyuluhan KIA kepada kelompok sasaran	12 kali	16 kali	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	KB	BP3AKB
6.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pendirian pusat layanan konseling KRR	1 tempat	4 tempat	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	KB	BP3AKB
7.	Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Meningkatnya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	6 kali	12 kali	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	KB	BP3AKB
8.	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pengumpulan data / bahan pembentukan tumbuh kembang anak	6 kali	12 kali	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	KB	BP3AKB

9.	Pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Meningkatnya pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	1 kali	2 kali	Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	KB	BP3AKB
10.	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pendampingan kelompok bina keluarga	6	15	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	KB	BP3AKB

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

13. URUSAN SOSIAL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Terberdayanya fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	3 kali	6 kali	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Sosial	Dinsosnakertrans
2.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	1 tempat	2 tempat	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinsosnakertrans
3.	Pembinaan panti asuhan / panti jompo	Meningkatnya pembinaan panti asuhan / panti jompo	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	3 kali	6 kali	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Sosial	Dinsosnakertrans
4.	Terberdayanya kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesos	Pemberdayaan karang taruna	4 kali	8 kali	Program pemberdayaan kelembagaan kesos	Sosial	Dinsosnakertrans
5.	Meningkatkan pembinaan penyakit masyarakat	Meningkatnya pembinaan tenaga yang mengelola Penyakit masyarakat	Terbinanya dan teratasinya para penyakit sosial seperti gelandangan dan PSK.	6 kali	9 kali	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan lainnya)	Sosial	Dinsosnakertrans
6.	Meningkatkan Pembinaan anak terlantar	Meningkatnya pembinaan anak terlantar	Meningkatnya frekuensi pembinaan	6 kali	10 kali	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinsosnakertrans
7.	Berkurangnya jumlah penyakit masyarakat	Penurunan penyakit masyarakat	Menurunnya jumlah penyakit masyarakat	120	80	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinsosnakertrans
8.	Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi SDA	Meningkatnya sumberdaya alam	Pencegahan dan kesiapan bila ada bencana alam	4	8	Program pencegahan dini penanggulangan bencana alam	Sosial	Dinsosnakertrans

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	6 kali	12 kali	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
2.	Peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	70 kali 6,07 %	90 kali 4,2 %	Program peningkatan kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
3.	Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Meningkatkan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	6 kali	15 kali	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
4.	Pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Akreditasi lembaga pelatihan	12 buah	16 buah	Program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

15. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Mengupayakan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Pendirian unit penanganan pengaduan masalah koperasi	3 tempat	8 tempat	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Mengembangkannya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Pelatihan kewirausahaan	4 kali	8 kali	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3.	Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	Meningkatnya sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga tentang promosi produk	4 lembaga	9 lembaga	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman koperasi	6 kali	8 kali	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan promosi dan kerja sama industri	Meningkatkan promosi dan kerja sama investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	2 kali	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Penanaman modal	BPPT
2.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi	Penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal	1 kali	Regulasi masterplan	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman modal	BPPT
3.	Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Meningkatkan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	1 kali	Regulasi potensi investansi	Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penanaman modal	BPPT

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

17. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan nilai budaya	Meningkatnya pengembangan nilai budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	2 kali	3 kali	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	3 kali	6 kali	Program pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pengelolaan keragaman budaya	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	Festival budaya daerah	2 kali	3 kali	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	3 badan	5 badan	Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda putus sekolah	4 kali	6 kali	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	2 kali	4 kali	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan ketrampilan elektronik bagi anggota usaha pemuda produktif	3 kali	5 kali dan bantuan modal usaha	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda	4 kali	6 kali	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga	Pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarpras olah raga	2 tempat	4 tempat	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Pengembangan kebijakan manajemen olahraga	Meningkatnya kebijakan manajemen organisasi olah raga	Pembinaan manajemen organisasi olah raga	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Olah raga	Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan Olah Raga dan pemuda	Terselenggaranya pekan OR tingkat Kabupaten	1 kali	2 kali	Program peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Meningkatkan pengembangan kerjasama kepemudaan	Meningkatnya kerja sama pembinaan kepemudaan	Frekuensi pembinaan kepemudaan	4 kali	6 kali	Program kerjasama dan pengembangan kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat	Penyusunan data base partai politik	Terprogram (1 kali)	Regulasi normatif	Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2.	Pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa	Terprogram	Regulasi (normatif)	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
3.	Pemeliharaan komtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya pemeliharaan kamtibmas	Pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	30 kali	45 kali	Program pemeliharaan kamtibmas	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
4.	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2 kali	4 kali	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
5.	Terberdayanya masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pengaktifan satuan keamanan lingkungan	Setiap desa	Setiap desa harus aktif	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
6.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	200	280 (tiap desa aktif)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
7.	Meningkatkan stabilitas keamanan sosial yang mantap	Meningkatnya IPOLEKSOSBUD yang mantap	Menurunya tingkat konflik dan kriminalitas	4 kali	2 kali	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Keamanan	Satpol PP

8.	Pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, aksi premanisme dan paktek prostitusi	10 kali	20 kali	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
9.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	4 kali	6 kali	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
10.	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	2 kali	6 kali	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	30	50	Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Otonomi Daerah	Set. DPRD
2.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah atau wakil kepala daerah	Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	12 kali	16 kali	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah atau wakil kepala daerah	Otonomi Daerah	Set. DPRD
3.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	3 bulan	3 – 4 bulan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
4.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	3 bulan	4 bulan	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
5.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perhitungan APBDesa	3	5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
6.	Peningkatan sistem pengawasan internal	Meningkatnya sistem pengawasan internal	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	6	10	Program peningkatan sistem pengawasan internal	Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD
8.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terprogram	Regulasi	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Administrasi Keuangan Daerah	DPPKAD

9.	Peningkatan kerja sama antar daerah	Meningkatnya kerja sama antar pemerintah daerah	Kerja sama dalam pelayanan publik	2 kali	4 kali	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Pemerintahan Umum	Setda
10.	Penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	6 kali	10 kali	Program penataan peraturan perundang – undangan	Pemerintahan Umum	Setda
11.	Pendidikan kedinasan	Meningkatnya pendidikan kedinasan	Pendidikan penjurangan struktural	4 orang	6 orang	Program pendidikan kedinasan	Pemerintahan Umum	Setda
12.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah	200 orang	250 orang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemerintahan Umum	BKD
13.	Pembinaan dan pengembangan aparatur daerah	Meningkatnya pengembangan aparatur daerah	Analisis jabatan PNS	250 orang	300 orang	Program pembinaan dan pengembangan aparatur daerah	Pemerintahan Umum	BKD
14.	Kelembagaan perangkat daerah	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah	Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah	Terprogram	Regulasi	Program kelembagaan perangkat daerah	Kepegawaian	BKD
15.	Ketatalaksanaan perangkat daerah	Meningkatnya perangkat daerah	Penyusunan standar pelayanan publik	1 kali	Terprogram dengan regulasi	Program ketatalaksanaan perangkat daerah	Kepegawaian	BKD
16.	Pendayagunaan aparatur daerah	Meningkatnya aparatur daerah	Sosialisasi kebijakan PAN daerah	1 kali	Regulasi	Program pendayagunaan aparatur daerah	Kepegawaian	BKD
17.	Koordinasi bidang administrasi pembangunan	Meningkatnya koordinasi bidang administrasi pembangunan	Pembuatan pedoman pelaksanaan APBD	Terprogram	Regulasi	Program koordinasi bidang administrasi pembangunan	Kepegawaian	BKD
19.	Koordinasi terpadu bidang perekonomian	Meningkatnya koordinasi terpadu bidang perekonomian	Penguatan ekonomi sektor riil	23 %	46 %	Program koordinasi terpadu bidang perekonomian	Administrasi Keuangan Daerah	Setda
20.	Koordinasi bidang tata pemerintahan	Meningkatnya koordinasi bidang tata pemerintahan	Koordinasi penyusunan LKPJ	1 kali	1 kali tepat waktu	Program koordinasi bidang tata pemerintahan	Pemerintahan Umum	Setda

21.	Koordinasi bidang pemerintahan desa	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan desa	Inventaris kekayaan desa	Terprogram tiap tahun	Terprogram tiap tahun (Regulasi)	Program koordinasi bidang pemerintahan desa	Pemerintahan Umum	Setda
22.	Koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatnya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Koordinasi penanganan masalah sosial	4 kali	8 kali	Program koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Pemerintahan Umum	Setda
23.	Koordinasi bidang kehumasan	Meningkatnya koordinasi bidang kehumasan	Penerbitan buletin	12 kali	12 kali	Program koordinasi bidang kehumasan	Pemerintahan Umum	Setda
24.	Penyelenggaraan keprotokolan daerah	Meningkatnya penyelenggaraan keprotokolan daerah	Penyelenggaraan keprotokolan	30 kali	45 kali	Program penyelenggaraan keprotokolan daerah	Pemerintahan Umum	Setda
25.	Terberdayanya sandi dan telekomunikasi	Pemberdayaan sandi dan telekomunikasi	Perlengkapan sandi	25	50	Program sandi dan telekomunikasi	Sandi	Setda
26.	Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	Meningkatkan koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan desa	30	30 (Regulasi)	Program koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	Pemerintahan	Setda
27.	Koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Meningkatnya koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Pembinaan lembaga masyarakat di wilayah kelurahan	15 kali	20 kali	Program koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Pemerintahan	Setda
28.	Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi daerah	Mantapnya angka inflasi	7,45	5,7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Pemerintahan	Setda
29.	Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi daerah	Realisasi pendapatan Daerah	943.965.603.144	12.943.966.533.155	Program pengembangan potensi pendapatan daerah	Pemerintahan	Setda
30.	Meningkatkan kualitas aparatur	Meningkatnya kualitas Aparatur daerah	Perkembangan nilai IPM	70,60	78,9	Penatalaksanaan pemerintah daerah	Pemerintahan	Setda
31.	Meningkatkan peran dan pengawasan kepada masyarakat	Meningkatnya peran dan pengawasan kepada masyarakat	Lancarnya pelaksana otonomi daerah	terprogram	regulasi	Program pelayanan administrasi perkan toran	Sekretariat	Inspektorat

32.	Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana	cukup	Sangat cukup	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat	Inspektorat
33.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Lancarnya tugas pokok SKPD	berjalan	Meningkatnya kinerja	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sekretariat	Inspektorat
34.	Meningkatkan laporan capaian kinerja	Meningkatnya laporan capaian kinerja	Meningkatnya capaian LAKIP	90 %	98%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sekretariat	Inspektorat
35.	Meningkatkan kualitas proses demokratisasi	Meningkatnya kualitas proses demokratisasi	Meningkatnya sistem pengawasan	80%	90%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Sekretariat	Inspektorat
36.	Meningkatkan kualitas Profesionalisme bagi pengawas	Meningkatnya kualitas Profesionalisme bagi pengawas	Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan	terprogram	regulasi	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Sekretariat	Inspektorat

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan energi dan protein per kapita - Penguatan cadangan pangan - Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan -stabilitas harga Pangan -Peningkatan skor polapangan harapan -pembinaan /pengawasan keamanan pangan 	Ketersediaan energi 1991,4 Ketersediaan Protein 61,7 Ada Stabil 78,9 1 kali	Ketersediaan energi 2000 Ketersediaan pangan 63 ada stabil 95,8 5 kali	Program peningkatan diversifikasi pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
2.	Mengembangkan pendekatan sistem agribisnis	Mengembangkan sistem agribisnis	Peningkatan pola kemitraan	6 buah	8 buah	Program pengembangan agribisnis	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
3.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan	Pengembangan program lokal	25 buah	35 buah	Program swadaya pangan	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
4.	Mantapnya perencanaan pembangunan ekonomi	Memantapnya perencanaan pembangunan ekonomi	Atas dasar harga konstan Atas dasar harga berlaku	5,03 11,17	7,2 13,2	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Koordinasi penanggulangan kemiskinan (jumlah penduduk miskin)	18,68 %	13,8 %	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun	Pelaksanaan Musrenbangda	1 kali	1 kali	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Deklat pamong desa di bidang keuangan desa	1 kali	4 kali	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
4.	Peningkatan peran perempuan di desa	Meningkatkan peran perempuan di desa	Pelatihan peran wanita dalam usaha ekonomi produktif	2 kali	4 kali	Program peningkatan peran perempuan di desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan	Pelatihan ketrampilan budidaya tanaman	2 kali	6 kali	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Memantapkan pendataan tentang pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pendataan tentang pemberdayaan masyarakat desa	Adanya bank data yang lebih lengkap	terprogram	Regulasi yang inovatif	Program pengembangan data	PMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat
7.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatnya upaya-upaya penurunan kemiskinan	Menurunnya penduduk miskin	18,11%	15,3%	Program pengentasan kemiskinan	PMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

23. URUSAN STATISTIK

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan data / informasi / statistik daerah	Meningkatnya pengembangan data / informasi	Pengumpulan data grobogan dalam angka	1 kali	1 kali	Program pengembangan data / informasi	Statistik	BPS

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan	Membuat data base tentang kearsipan	1 kali	Regulasi	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah
2.	Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen	Penataan kearsipan	Terprogram	Regulasi	Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah
3.	Pemeliharaan rutin / berkala	Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala	Pelaporan kondisi situasi data	50	60	Program pemeliharaan rutin / berkala	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah
4.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Penerbitan naskah sumber arsip	40	50	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah
5.	Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen	BINTEK tentang kearsipan	2 kali	4 kali	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah
6.	Peningkatan kualitas Pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi	Talk show tentang kualitas pelayanan informasi	2 kali	3 kali	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Pengadaan alat studio dan komunikasi	3 buah	6 buah	Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Komunikasi	Setda
2.	Pengkajian penelitian bidang komunikasi dan informasi	Melaksanakan penelitian di bidang komunikasi dan informasi	Kajian komunikasi dan informasi	1 kali	1 kali	Program kajian tentang komunikasi dan informasi	Komunikasi	Setda
3.	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan jurnalistik	1 kali	2 kali	Program peningkatan SDM yang menangani komunikasi dan informasi	Komunikasi	Setda
4.	Kerja sama dengan pihak media massa	Meningkatnya kerja sama dengan media massa	Penyebaran informasi pembangunan	80 kali	100 kali	Program kerja sama dengan media massa	Komunikasi	Setda
5.	Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Menguatnya kelembagaan dalam komunikasi dan informasi	Pendayagunaan media center daerah	40	60	Program penguatan kelembagaan dalam komunikasi dan informasi	Komunikasi	Setda
6.	Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika daerah	Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika daerah	Kompetensi bidang kehumasan	4 kali	6 kali	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika daerah	Komunikasi	Setda

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyuluhan program budaya baca	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Daerah
2.	Penyelamatan dan pelestarian koleksi pustaka	Penyelamatan koleksi pustaka	Pendataan karya cetak dan karya rekam	2 kali	4 kali	Program penyelamatan dan pelestarian koleksi pustaka	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Daerah

7.2.2.2. Urusan Pilihan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

1. URUSAN PERTANIAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pelatihan petani tentang agribisnis	4 kali	8 kali	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Distanhort
2.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	Pemeliharaan produksi pertanian	63,56 kwintal/ha	75,8 kwintal/ha	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Pertanian	Distanhort
3.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	Pelatihan penerapan teknologi pertanian	4 kali	6 kali	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Pertanian	Distanhort
4.	Terberdayanya penyuluh pertanian lapangan	Terberdayanya penyuluh lapangan	Pengembangan desa wisata agro	3 obyek	6 obyek	Program pembudayaan penyuluh lapangan	Pertanian	Distanhort
5.	Peningkatan produk pertanian	Meningkatnya produk pertanian	Peningkatan produksi jagung	60,63 kwintal/ha	73,4 kwintal/ha	Program peningkatan produksi pertanian	Pertanian	Distanhort
6.	Penanggulangan penyakit ternak	Meningkatkan penanggulangan penyakit ternak	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	10 kali	20 kali	Program penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Distanhort
7.	Peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Sapi yang keluar tahun 2009 = 11.988 ekor	12.500 ekor sapi	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Distanhort
8.	Penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	Pelatihan teknologi peternakan teknologi tepat guna	12 kali	16 kali	Program penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Distanhort
9.	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	Hasil produksi peternakan masyarakat	- Sapi potong 137.322 ekor - Kambing 105.252 ekor	145.455 ekor 110.450 ekor	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Distanhort

10.	Pengembangan jaringan irigasi	Meningkatnya pengembangan jaringan irigasi	Pengembangan irigasi tanah dangkal	36 km	45 km	Program pengembangan jaringan irigasi	Pertanian	Distanhort
11.	Pengembangan pertanian organik	Meningkatnya pengembangan pertanian organik	Pengembangan rumah kompos	12 obyek	18 obyek	Program pengembangan pertanian organik	Pertanian	Distanhort
12.	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani	1793	1801	Program peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Pertanian	Distanhort
13.	Penyediaan sarana produksi pertanian	Meningkatnya penyediaan sarana produksi pertanian	Penyediaan alat pasca panen pedal thresher	87	98	Program penyediaan sarana produksi pertanian	Pertanian	Distanhort
14.	Pencegahan dan penanggulangan hama	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan hama	Pengawasan Jalur Benih Antar Lapang (JABAL)	27	45	Program pencegahan dan penanggulangan hama	Pertanian	Distanhort

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

2. URUSAN KEHUTANAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Optimalisasi pola hutan rakyat	187 ha	201 ha	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	2 kali	6 kali	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.	Pelayanan publik urusan kehutanan	Meningkatkan pelayanan publik pelayanan kehutanan	Pengesahan hasil hutan	2,3 %	4,6 %	Program pelayanan publik urusan kehutanan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4.	Pengembangan sistem informasi geografi kehutanan	Meningkatnya pengembangan sistem informasi geografi	Penyusunan data dan statistic kehutanan	4,6 %	8,7 %	Program pengembangan sistem informasi geografi	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5.	Pemanfaatan kawasan hutan industri	Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan industri	Pertanian tanaman gogolanchah	1,04 %	2,8 %	Program pemanfaatan kawasan hutan industry	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6.	Rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan	1 ha	2 ha	Program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7.	Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Pengelolaan industri hasil hutan	Terprogram	Regulasi	Program peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

8.	Perencanaan dan pengembangan hutan	Meningkatnya perencanaan dan pengembangan hutan	Pendampingan kelompok usaha perhutani rakyat	70 kelompok usaha	80 kelompok usaha	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
9.	Pelayanan publik urusan kehutanan	Meningkatnya pelayanan publik urusan kehutanan	Sosialisasi peraturan UU mengenai penatausahaan kayu	4 kali	8 kali	Program peningkatan pelayanan publik urusan kehutanan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatnya pengendalian kebakaran hutan	Pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan	3	6	Program pengendalian kebakaran hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Sosialisasi regulasi bahan galian C	2 kali	4 kali	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben
2.	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	4 kali	8 kali	Program peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben
3.	Peningkatan pelayanan usaha pertambangan	Meningkatnya pelayanan usaha pertambangan	Pembinaan penambang liar	6 kali	8 kali	Program peningkatan pelayanan usaha pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben
4.	Peningkatan regulasi energi sumber daya dan mineral	Meningkatnya regulasi energi sumber daya dan mineral	Regulasi pertambangan umum	1 kali	Regulasi	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben
5.	Pengelolaan dan pengembangan potensi dan teknologi geologi	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan potensi dan teknologi geologi	Pemetaan cekungan air tanah	2 obyek	4 obyek	Program pengelolaan dan pengembangan potensi dan teknologi geologi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben
6.	Upaya perlindungan dan konservasi alam	Meningkatnya upaya perlindungan koservasi alam	Rasio jumlah kasus sumber daya alam	10 kasus	5 kasus	Program peningkatan regulasi energi sumber daya dan mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Disperindagtamben

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

4. URUSAN PARIWISATA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Pelatihan pemandu wisata terpadu	2 kali	4 kali	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Dinas Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	Membuat paket wisata unggulan	2 paket	4 paket	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pengembangan kemitraan	Meningkatnya pengembangan kemitraan	Pembinaan sektor pendukung pariwisata	2 obyek	4 obyek	Program pengembangan kemitraan	Pariwisata	Dinas Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan dan Pariwisata

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

5. URUSAN PERIKANAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan bibit ikan unggul	3 obyek	6 obyek	Program pengembangan budidaya perikanan	Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	3 obyek	6 obyek	Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan	Promosi hasil perikanan	2 kali	4 kali	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
4.	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Pemasaran produk perikanan	3 lembaga	4 lembaga	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

6. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	20 kali	25 kali	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Disperindagtamben
2.	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya peningkatan dan pengembangan ekspor	Membangun jejaring dengan eksportir	4 obyek	8 obyek	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	Disperindagtamben
3.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kelembagaan kerja sama kemitraan	20 mitra	25 mitra	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Disperindagtamben
4.	Pembinaan pedagang keliling dan asongan	Meningkatnya pembinaan pedagang keliling dan asongan	Penyuluhan disiplin pedagang keliling dan asongan	6 kali	12 kali	Program pembinaan pedagang keliling dan asongan	Perdagangan	Disperindagtamben

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Meningkatnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	8 obyek	12 obyek	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Perindustrian	Disperindagtamben
2.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah	Pemberian fasilitas kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Disperindagtamben
3.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	8 obyek	12 obyek	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Disperindagtamben
4.	Penataan struktur industri	Meningkatnya penataan struktur industri	Pembinaan keterkaitan produk hulu – hilir	6 obyek	10 obyek	Program penataan struktur industri	Perindustrian	Disperindagtamben
5.	Pengembangan sentra – sentra industri potensial	Meningkatnya pengembangan sentra – sentra industri potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	1 obyek Terprogram	2 obyek Regulasi	Program pengembangan sentra – sentra industri potensial	Perindustrian	Disperindagtamben

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

8. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Pengembangan wilayah transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	Kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	3 obyek Terprogram	4 obyek Regulasi	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi	Dinsosnakertrans
2.	Transmigrasi regional	Meningkatnya transmigrasi regional	Penyuluhan transmigrasi regional	4 kali	8 kali	Program transmigrasi regional	Transmigrasi	Dinsosnakertrans